



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA)

KABUPATEN LANGKAT

TAHUN 2022

**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Untuk mengantisipasi kuatnya arus perubahan yang melanda dunia usaha dewasa ini, setiap organisasi harus melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk dapat tetap eksis. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu tindakan adaptif yang secara bersama-sama dilakukan oleh segenap unsur dalam organisasi.

Aspek utama yang harus mendapat perhatian adalah adanya perubahan paradigma yang membutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi, untuk itu harus dapat ditentukan Visi organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan Rencana Strategis sebagai suatu penjabaran cara mewujudkan Visi tersebut.

Dalam hubungan dengan pemikiran tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dengan Rencana Strategik yang dimiliki, menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 sebagai pedoman aktivitas organisasi.

Semoga dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh Aparat Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, Mitra Kerja, serta segenap masyarakat dalam menciptakan Good Governace di Kabupaten Langkat.

Stabat,

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT
KEPALA**

**SUKHYAR MULYAMIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650620 198511 1 001**



DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB	I	: PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	1
		1.3 Maksud dan Tujuan	2
		1.4. Sistematika Penulisan	2-3
BAB	II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Tahun 2020	4
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	15
		2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	16
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Dinas	18
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB	III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB	IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB	V	: PENUTUP	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Langkat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Langkat dan merupakan landasan operasional bagi seluruh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat agar tujuan dan sasaran pembangunan berjalan sesuai dengan arah visi yang telah ditentukan.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022, merupakan penjabaran secara rinci tentang Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Langkat dalam sektor Perdagangan dan Perindustrian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Bupati Langkat Nomor: 050.324/BPP- Langkat/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 Tentang Pengiriman Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Langkat 2019 – 2024 kedalam rencana program prioritas kegiatan tahunan daerah.
- b. Menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah

Sedangkan penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022 bertujuan untuk :

- a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Langkat Tahun 2022.
- b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Langkat Tahun 2021.
- c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Bab V PENUTUP



B A B II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Disdagprin Kabupaten Langkat Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Disperindag Kabupaten Langkat Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Disperindag Kabupaten Langkat Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Disdagprin Kabupaten Langkat Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel T-C. 29 berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Langkat**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Perangkat Daerah sampai dengan tahun(2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	RealisasiRenja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan Pemerintahan Pilihan								
3	30									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
5	01	01								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	1	100%		
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	1	100%		
		Jumlah Kasus Pelanggaran Kedisiplinan Aparatur	0	2	0	0	0	0		

						Cakupan Peningkatan Kompetensi Pegawai	100%	100%		100%				
						Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						Persentase Laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						Persentase Laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	01	01	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	01	01	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5		1	1	100%	1 Dokumen		
5	01	01	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15	3	3	3	100%	3 Dokumen	2Dokumen	2
5	01	01	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
						Tersedianya Laporan LAKIP OPD	5 Dokumen	1	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
						Tersedianya LKPJ OPD	5 Dokumen	1	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1
						Tersedianya LPPD OPD	5 Dokumen	1	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1

5	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Keuangan								
			0				100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	01	01	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai OPD	70 bulan	14 bulan	14	14	100%	14 bulan		
5	01	01	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, PPTK dan Pegawai Non PNS	60 bulan	12 bulan	12	12	100%	12 bulan		
						Pegawai Non PNS	60 bulan	13 bulan	13	13	100%	13 bulan		
5	01	01	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	15 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100%	3 Dokumen		
5	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	01	01	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 tahun	1Tahun	1	1	100%	1Tahun		
5	01	01	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1Tahun		

5	01	01	2 0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1Tahun		
5	30	01	2 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	• Kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai Non PNS	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1Tahun		
5	30	01	2 0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1 Tahun		
5	30	01	2 0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1 Tahun		
5	30	01	2 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	5Tahun	1Tahun	1	1	100%	1 Tahun		
5	30	01	2 0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	5	1Tahun	1	1	100%	1 Tahun		
5	01	01	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

5	01	01	208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Tagihan Listrik yang dibayar	60	12 bulan	12	12	100%	12 bulan		
5	01	01	208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk Pengurus Barang pembantu, Pejabat Penerima / Pengadaan, Pengurus barang pengguna dan Pegawai Non PNS	60	13 bulan	13	13	100%			
3	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%		
5	01	01	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5 tahun	1 tahun	1	1	100%	1 tahun		
5	01	01	209	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5 tahun	1 tahun	1	1	100%	1 tahun		
5	01	01	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	5 tahun	1 tahun	1	1	100%	1 tahun		

3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	25%	0	5%	5%	100%	10%		
3	30	02	2	0	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya Di Tingkat Darah Kabupaten /Kota	25%	0	5%	5%	100%	5%		
3	30	02	2	0	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Toko Swalayan	2345	350	634	634	100%	883 toko /swalayan		
			0	6		Jumlah Toko Swalayan	2458	350	400	400	100%			
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kelompok pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	4 kelompok	1	1	1	100%	2 kelompok		
						Jumlah Pasar Desa yang Berdaya Saing dan Dikelola Secara Modern	2 Pasar	1	0	1	100%	0		
3	30	03	2	0	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Desa yang dibangun dan dikelola	10 Pasar		1	1	100%	0 Pasar		
3	30	03	2	0	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Perdesaan yang dibangun	10 Pasar	0	1	1	100%			

						Jumlah Pasar yang direhab	10 Pasar	2	0	0	0	4 pasar			
3	30	03	2	0	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	4Kelompok	1	1	1	100%	2kelompok		
3	30	03	2	0	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	kelompok	1	1	1	100%	2kelompok		
3	30	04				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tngkat Lonjakan Harga Barang Pokok	5%	0%	5%	5%	100%	5%		
3	30	04	2	0	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terkendalnya Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	10	1	2	2	100%	2kegiatan		
3	30	04	2	0	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasar Murah	10	1	2	2	100%	2Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	30	04	2	0	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengawasan Toko Distributor/eceran Pupuk bersubsidi	5%	0%	5%	5%	100%	5%		
3	30	04	2	0	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Sosialisasi Pengawasan Perdagangan Tata Tertib Niaga	3484 Toko/Swalayan	600	634	634	100%	134		

3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan keluar Negeri	35 Produk	15	15	0	0%	0			
3	30	05	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (1) satu Daerah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Promosi Dagang Produk Unggulan	35 Produk	15	15	0	0%	0		
3	30	05	2	0	3	Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya Promosi di pekan Raya Sumatera Utara	5 kegiatan	2	1	0	0%	2 kegiatan		
3	30					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pasar Tertib Ukur	4	1	1	1	100%	2		
3	30	06	2	0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	cakupan pelayanan Metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	4	1	1	1	100%	2		
3	30	06	2	0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur	4	1	1	1	100%	2 Pasar		
3	30	06	2	0	1	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah kecamatan yang diawasi alat UTTPnya	23		23	23	100%	23 kecamatan		
3	30	07				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tingkat Lonjakan harga barang Pokok	5%	0	5%	5%	100%	5%		

3	30	07	2 0 1	0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	cakupan pemasaran dan peningkatan Produk dalam Negeri	5%	0	5%	5%	100%	5%		
3	30	07	2 0 1	0	Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	jumlah kecamatan yang tersosialisasi	10 kecamatan	-	2	2	100%	2 kecamatan		
3	30	07	2 0 1	0 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Operasional Gudang SRG	1 buah	0	0	0	0	1 tahun		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM	3847 IKM		3447	3447	100%			
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Pengembangan Sentra	4 sentra		1	1	100%	1		
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	500					1		
3	31	02	2 0 1		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	500					1		
3.07	01	17			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pengembangan Sentra	4 sentra	1	1	1	100%	2		

3.07	01	17	0 2	5	Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi	23 kecamatan	0				5		
------	----	----	--------	---	--	--------------------------------------	--------------	---	--	--	--	---	--	--



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat bisa dikatakan sebagai Dinas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan. Sesuai dengan target pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 759.096.500,- .

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui :

- a. Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana pendapatan.
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
- c. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama tapi dikarenakan adanya pandemi covid -19 ditahun 2020 terjadi penurunan. Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat melalui Bidang Perdagangan mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar (kaki lima dan asongan) merupakan agenda tetap tahunan dan sampai dengan saat ini segala permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat

No	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan Tertib Niaga			5%	10%	0,15%	0,2%	5%	10%	0,15%	0,2%	
2	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern			0	0	1	1	0	1	1	1	
3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
4	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan keluar negeri			0	1	5	10	0	1	5	10	
5	Cakupan Pengawasan Perdagangan yang melaksanakan Tertib Niaga			5%	10%	10%	20%	5%	10%	10%	20%	
	Jumlah Pasar Tertib Ukur			1	2	2	3	2	2	2	3	
6	Persentase produk yang dipasarkan didalam negeri			20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
7	Cakupan Bina Kelompok IKM			3447	20%	40%	40%	3447	20%	40%	40%	
	Jumlah sentra IKM Aktif			1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi			3347	3547	1	2	3447	3547	1	2	
9	Persentase data Industri			1	1	100	100	1	1	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Langkat mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang

belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Langkat

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Langkat.

Sebenarnya di Kabupaten Langkat ada beberapa produk yang punya potensi untuk ditingkatkan dalam pangsa pasar nasional dan internasional selain furniture. Beberapa produk itu mempunyai daya saing tinggi, sifat kekhasan daerah, kualitas produk dan kualitas yang baik diantaranya : Furniture, Tenun Langkat, Anyaman rotan, Terasi, Kerajinan Kulit, Keramik, lidi sawit dll.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera/tera ulang
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetropolitan
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan HKI
4. Persaingan pasar global yang makin ketat sehingga perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
5. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM
6. Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan.
7. Kurang berkembangnya teknologi permesinan di dalam negeri yang mendukung berkembangnya produk IKM.
8. Kurang optimalnya pembayaran retribusi pasar, dimana salah satu faktornya masih rendahnya kesadaran pedagang pasar dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi.
9. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
10. Keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya fasilitasi dan penataan PKL.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan. Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

- Menghemat anggaran dalam kegiatan
- Terus berusaha meningkatkan pemasaran produk unggulan

- Menambah tenaga penera di metrologian
- Meningkatkan kualitas pengrajin IKM
- Peningkatan jumlah pasar dalam kondisi baik
- Penataan PKL dengan baik

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2022. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dengan Bappeda Kabupaten Langkat. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel T-C.31 dibawah ini.







Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	7,512,026,536	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	7,512,026,536	
			Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%				Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%		
			Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	100%				Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	100%		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	19,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	19,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	5,000,000	
		Jumlah Dokumen Perubahan Renja	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Perubahan Renja	1 Dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	5,000,000	
		Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen			Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen			Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	5,980,018,355	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	5,980,018,355	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,820,418,605	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,820,418,605	

		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan				Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		
		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12 Bulan				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12 Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, PPTK, KPA, PPK SKPD, Pengelola keuangan	156 OB	154,599,750	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, PPTK, KPA, PPK SKPD, Pengelola keuangan	156 OB	154,599,750	
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	6%	20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	6%	20,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai yang mengikuti Diklat			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai yang mengikuti Diklat			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Pegawai yang mengikuti Bimtek	3 orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Pegawai yang mengikuti Bimtek	3 orang	20,000,000	

Undangan					Undangan					
Administrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	466,579,681	Administrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	466,579,681	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor	9 jenis	7,007,246	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor	9 jenis	7,007,246	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	48 jenis	49,991,809	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	48 jenis	49,991,809	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	9,025,898	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	9,025,898	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Makan dan Minum rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai non ASN	600 kotak	12,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Makan dan Minum rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai non ASN	600 kotak	12,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy	12 jenis	135,169,228	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy	12 jenis	135,169,228	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan	12 bulan	3,385,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan	12 bulan	3,385,500	
Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	250,000,000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	12,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	12,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin	2 unit	12,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin	2 unit	12,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	815,380,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	815,380,200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Pembayaran Rekening Air Listrik dan Telepon	12 bulan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Pembayaran Rekening Air Listrik dan Telepon	12 bulan	200,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa yang dibayarkan pegawai non PNS	585 OB	615,380,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa yang dibayarkan pegawai non PNS	585 OB	615,380,200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	199,048,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	199,048,300	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	121,161,300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	121,161,300	
		Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Kondisi Baik	unit				Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Kondisi Baik	unit		

			Kendaraan Dinas Roda empat dengan Kondisi Baik	unit				Kendaraan Dinas Roda empat dengan Kondisi Baik	unit		
			• Bahan bakar minyak kendaraan dinas	Liter				• Bahan bakar minyak kendaraan dinas	Liter		
			• Oli kendaraan dinas	12 bulan				• Oli kendaraan dinas	12 bulan		
			• Suku cadang kendaraan dinas	12 bulan				• Suku cadang kendaraan dinas	12 bulan		
			• Pajak kendaraan dinas	unit				• Pajak kendaraan dinas	unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	49 unit	32,887,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	49 unit	32,887,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	1 unit	45,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	1 unit	45,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Langkat /SUMUT	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	0,15%	55,000,000		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Langkat /SUMUT	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	0,15%	55,000,000
2	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan		Fasilitasi Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin toko swalayan				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin took swalayan			

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan yang difasilitasi			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan yang difasilitasi			
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	15%	55,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	15%	55,000,000	
Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2		Jumlah Pemeriksaan bahan berbahaya di Toko/swalayan	640 Toko/Swalayan		Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2		Jumlah Pemeriksaan bahan berbahaya di Toko/swalayan	640 Toko/Swalayan		
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya		Jumlah Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya yang diawasi	640 Toko/Swalayan	55,000,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)		Jumlah Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya yang diawasi	640 Toko/Swalayan	55,000,000	
		Sosialisasi SNI wajib , BDKT dan Pelabelan bahan	1 Sosialisasi					Sosialisasi SNI wajib , BDKT dan Pelabelan bahan		1 sosialisasi

	(PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)		berbahaya			Maupun Produsen B2 (P-B2)		berbahaya			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Langkat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern	1 unit	390,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Langkat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern	1 unit	390,000,000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terbangunnya dan Terkelolanya sarana distribusi Perdagangan	1 unit	350,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Terbangunnya dan Terkelolanya sarana distribusi Perdagangan	1 unit	350,000,000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar Yang dibangun	1unit	350,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar Yang dibangun	1unit	350,000,000	
3											
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang dibina	2 kelompok	40,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang dibina	2 kelompok	40,000,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pengelola sarana distribusi yang dibina, Pendataan Lokasi Pasar	2 kelompok	40,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pengelola sarana distribusi yang dibina, Pendataan Lokasi Pasar	2 kelompok	40,000,000	

4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Langkat/Sumut	Tingkat lonjakan harga barang pokok	5%	258,435,200	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Langkat/Sumut	Tingkat lonjakan harga barang pokok	5%	258,435,200
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah harga barang dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten	9 komoditi	108,435,200	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah harga barang dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten	9 komoditi	108,435,200
	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi		Jumlah data Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	10 komoditi	34,500,000	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi		Jumlah data Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	10 komoditi	34,500,000
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	2 kali	73,935,200	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	2 kali	73,935,200
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kinerja realisasi Pupuk	100%	150,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	100%	150,000,000

	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengadaan Pupuk dan Pestisida yang diawasi			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengadaan Pupuk dan Pestisida yang diawasi			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi	134 kios , 2 x	150,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi	134 kios , 2 x	150,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	5 produk	801,364,965	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	5 produk	801,364,965	
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya nya Promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah	5 Produk	801,364,965	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya nya Promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah	5 Produk	801,364,965	
	Pameran Dagang Nasional		Dikenalnya produk unggulan di PRSU	11 produk	715,364,965	Pameran Dagang Nasional		Di kenalnya produk unggulan di PRSU	11 produk	715,364,965	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah promosi dan pameran dagang	1 pameran		Pameran Dagang Nasional		Jumlah promosi dan pameran dagang	1 pameran		
	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Produk yang dipasarkan di HUT Kab. Langkat	25 produk	50,000,000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Produk yang dipasarkan di HUT Kab. Langkat	25 produk	50,000,000	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	5 Pelaku usaha	36,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	5 Pelaku usaha	36,000,000	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	20%		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Langkat/SU MUT/Luar Provinsi	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	20%		

		Jumlah Pasar Tertib Ukur	2 Pasar	128,337,900			Jumlah pasar tertib ukur	2 Pasar	128,337,900	
		Jumlah pasar tertib niaga	2 Pasar	128,337,900			Jumlah pasar tertib niaga	2 Pasar	128,337,900	
		Jumlah Pasar Tertib ukur	2 Pasar	98,937,900			Jumlah Pasar Tertib niaga	2 Pasar	98,937,900	
		Jumlah Pengguna alat UTTP yang diawasi dan Terlaksananya sosialisasi	23 kecamatan, 1 x	29,400,000			Jumlah Pengguna alat UTTP yang diawasi dan Terlaksananya sosialisasi	23 kecamatan, 1 x	29,400,000	
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Langkat/ Sumut	Persentase produk yang dipasarkan didalam negeri	40%	140,870,400	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Langkat/ Sumut	Persentase produk yang dipasarkan didalam negeri	40%	140,870,400
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Terlaksananya promosi Produk yang dipasarkan di dalam Negeri secara online	320 produk	140,870,400	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Terlaksananya promosi Produk yang dipasarkan didalam Negeri secara online	320 produk	140,870,400

	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Sosialisasi Produk yang dipasarkan Dalam Negeri secara online	320 produk	100,870,400	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Sosialisasi Produk yang dipasarkan Dalam Negeri secara online	320 produk	100,870,400	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		-Jumlah Resi Gudang -Tersosialisasinya sistem resi Gudang kepada pelaku usaha	0 Resi Gudang 10 Pelaku Usaha	40,000,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		-Jumlah Resi Gudang -Tersosialisasinya sistem resi Gudang kepada pelaku usaha	0 Resi Gudang 10 Pelaku Usaha	40,000,000	
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Langkat / SUMUT	Cakupan Bina Kelompok IKM	40%	340,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Langkat / SUMUT	Cakupan Bina Kelompok IKM	40%	340,000,000	
			Jumlah sentra IKM Aktif	1 Sentra				Jumlah sentra IKM Aktif	1 Sentra		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok IKM yang dibina	48 kelompok	340,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok IKM yang dibina	48 Kelompok	340,000,000	
			Jumlah Sentra IKM Aktif	1 Sentra				Jumlah Sentra IKM Aktif	1 sentra		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan		Jumlah kebijakan Perindustrian	1 peraturan	80,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan		Jumlah kebijakan Perindustrian	1 peraturan	80,000,000	

	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Peningkatan kualitas sumber daya industri			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Peningkatan kualitas sumber daya industri			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Pengembangan Sentra Industri	2 sentra	260,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Pengembangan Sentra Industri	2 sentra	260,000,000	
			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan	200 IKM				Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan	200 IKM		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah IKM binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah IKM binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan			
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Langkat / SUMUT	Persentase data Industri	22%	40,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Langkat / SUMUT	Persentase data Industri	22%	40,000,000	

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI	17 industri	40,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI	17 industri	40,000,000	
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota		Jumlah industri yang terdaftar di SIINAS, sosialisasi	17 Industri, 1 kali	40,000,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota		Jumlah industri yang terdaftar di SIINAS, sosialisasi	17 Industri, 1 kali	40,000,000	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas		Tersedianya Data kawasan industri yang Update		-	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas		Tersedianya Data kawasan industri yang Update		-	
TOTAL				9,666,035,001	TOTAL				9,666,035,001	





2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke SKPD sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup SKPD untuk ditindaklanjuti dalam draft renja SKPD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel TC-32 berikut ini.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(4)	(3)	(6)	(8)
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. langkat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara moderen		
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Langkat	Jumlah Pasar Yang dibangun		
1	Pembangunan Pasar Tradisional	Desa Securei Selatan Kecamatan Babalan	Pembangunan Pasar Tradisioal	300,000,000	Fraksi PAN
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab Langkat	Cakupan Bina Kelompok IKM	260,000,000	
			Jumlah sentra IKM Aktif		

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Pembangunan Industri	260,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan	260,000,000	
1	Pelatihan Diversifikasi produk pangan dan bantuan Peralatan	Kec. Stabat	Permohonan batuan Kelompok Usaha Bersama KUBE "Puja Kesuma"	20.000.000	Fraksi Golkar
2	Pelatihan Kerajinan Berbahan baku Lidi sawit	Kecamatan Gebang Desa Padang Tualang	Mengurangi Pengangguran dan menambah ekonomi masyarakat		Kepala Desa Padang Langkat
3	Bimtek Diversifikasi Gula Aren menjadi Gula Semut	Kecamatan Sawit Sebrang	Meningkatkan Pengetahuan dalam dalam Pengetahuan Gula Aren Menjadi Gla Semut		Kepala Desa Alur gadung
4	Pelatihan Kerajinan Menjahit	Kecamatan Pematang Jaya	Meningkatkan Pengetahuan dalam menjahit		Kepala Desa Perkebunan Damar Condong
5	Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lidi Sawit	Kecamatan Gebang	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lidi sawit		Kepala Desa Pasiran
6	Pelatihan Kerajinan Berbahan baku Lidi sawit	Kecamatan Wampu	Melimpahnya lidi sawit yang belum dimanfaatkan dengan maksimal yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi		Lurah Bingai
7	Pelatihan Kerajinan Berbahan baku Lidi sawit	Kecamatan Salapian	Pelatihan Pembuatan Sapu lidi dan bantuan alat untuk membuat gagang sapu		Kepala Desa Naman Jahe



B A B III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2019-2024, maka telah dibuat visi dan misi yang ingin dicapai Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kepala Perangkat Daerah harus memiliki tujuan dan sasaran yang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah tersebut.

Adapun yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 adalah :
“Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dan mengetahui peran program-program serta hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.

MISI

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata.

Dalam rangka mencapai Misi yang telah dikemukakan di atas disusun tujuan sebagai berikut :

3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui pengembangan pariwisata

Dalam rangka mencapai Misi yang telah dikemukakan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

3.1.2 Meningkatnya Daya Saing UMKM dan IKM melalui Pemanfaatan Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan.

Untuk dapat mengetahui dan mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, harus dirumuskan Indikator – Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan.

Penetapan Indikator tersebut diperlukan sebagai pedoman dan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran melalui strategi yang telah dipilih. Indikator tersebut harus memiliki besaran target yang akan dicapai. Realisasi pencapaian target Indikator digunakan sebagai bahan perbaikan maupun peningkatan pelaksanaan Strategi pencapaian sasaran yang telah dipilih.

Berikut ini adalah Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022, yaitu :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		Target Kinerja Sasaran 2022
			INDIKATOR	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan 3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui pengembangan pariwisata	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya daya saing UMKM & IKM melalui pemanfaatan produksi pertanian, perkebunan, dan kelautan	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen(%)	11,27
			Persentase kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB	Persen (%)	16,01

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adapun program dan kegiatannya yang direncanakan adalah Program dan Kegiatan Hasil Pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dikarenakan Program dan Kegiatan yang tertampung dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat untuk Tahun 2022 masih menggunakan Program dan Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006. Dan tahun 2022 tidak ada lagi pembagian belanja langsung dan tidak langsung semua diklasifikasikan sebagai belanja langsung dimana total Belanja Langsung yang direncanakan untuk tahun 2022 adalah Rp. 9,666,035,001,-.

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Program Perencanaan Pembangunan Industri
9. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional.

Untuk kegiatan – kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan :
 - a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
Kegiatan :
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
4. Program Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
Kegiatan :
 - a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Ekspor
Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

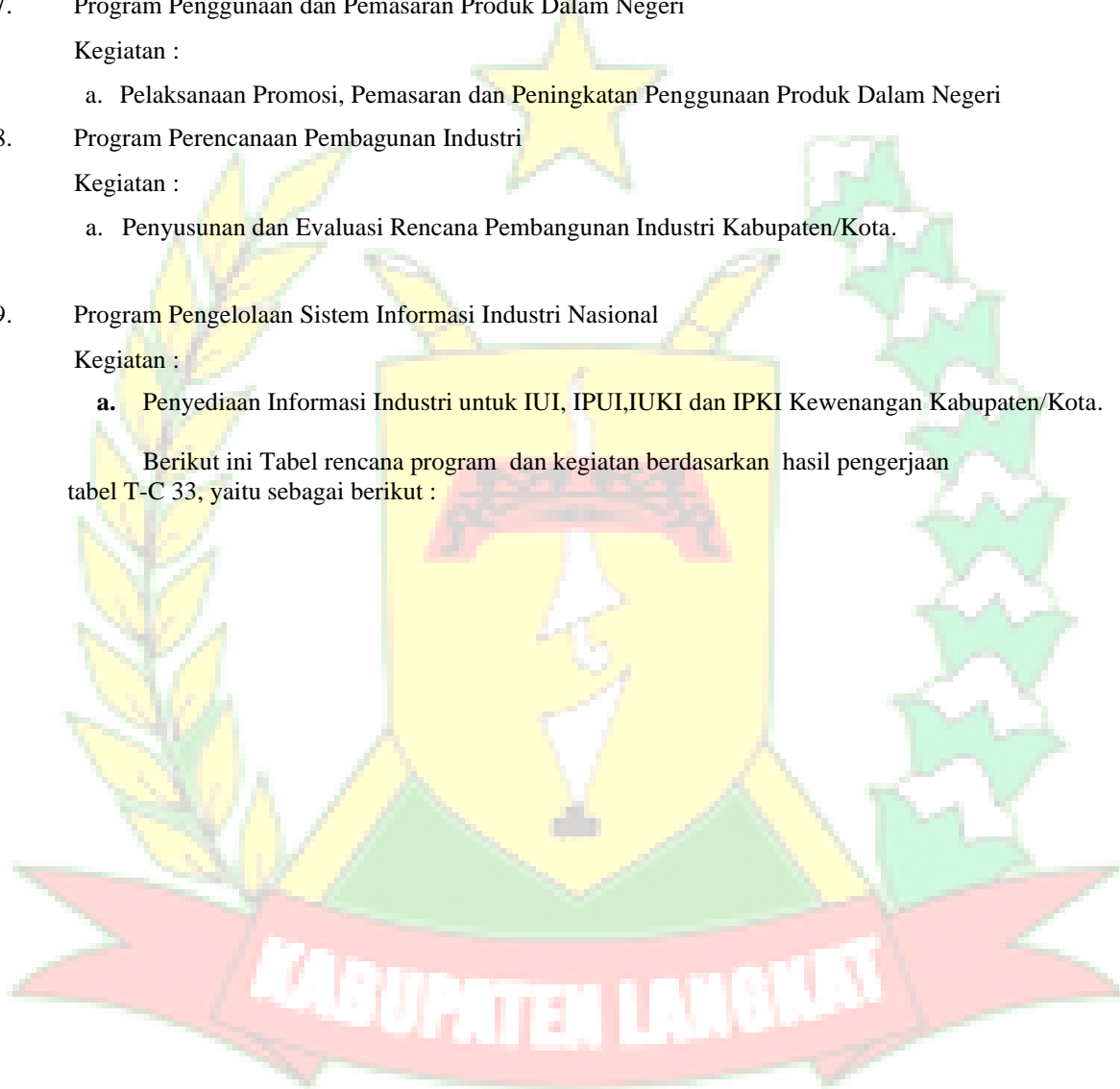
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - b. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Program Perencanaan Pembagunan Industri
Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Kegiatan :
 - a. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berikut ini Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C 33, yaitu sebagai berikut :



Tabel T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	DisDagPerind Kab. Langkat, dan Sumut dan Luar Provinsi	100%	7,512,026,536	APBD		100%	7,654,842,727
					Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu		100%				100%	
					Cakupan peningkatan kompetensi pegawai		100%				100%	
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
					Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	

3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	19,000,000				20,000,000
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		1 Dokumen	5,000,000			1 Dokumen	5,200,000
						Jumlah Dokumen Perubahan Renstra		1 Dokumen			1 Dokumen		
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,200,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,200,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	3,000,000			1 Dokumen	3,200,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen	5,000,000			1 Dokumen	5,200,000
						Jumlah Dokumen LKPJ		1 Dokumen			1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen LPPD		1 Dokumen			1 Dokumen		
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	DisDagPerind Kabupaten Langkat	100%	5,980,018,355			100%	6,081,218,355
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	5,820,418,605			14 Bulan	5,920,418,605
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		12 Bulan			12 Bulan		

						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		12 Bulan				12 Bulan	
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, PPTK, KPA, PPK SKPD, Pengelola keuangan		156 OB	154,599,750			156 OB	155,599,750
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah		3 Dokumen	5,000,000			3 Dokumen	5,200,000
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi	6%	20,000,000			8%	22,000,000
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Langkat						
3	30	01	2.05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti Diklat	Luar Daerah dan Luar Provinsi						
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti Bimtek	Luar Daerah dan Luar Provinsi	3 orang	20,000,000			4 orang	22,000,000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi	100%	466,579,681			100%	480,385,872

3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor		9 jenis	7,007,246			9 jenis	7,100,246
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		48 jenis	49,991,809			48 jenis	50,000,000
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		25 jenis	9,025,898			26 jenis	9,030,898
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai non ASN		600 kotak	12,000,000			600 kotak	12,100,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy		12 jenis	135,169,228			12 jenis	136,169,228
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		12 bulan	3,385,500			12 bulan	3,485,500
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi	12 bulan	250,000,000			12 bulan	262,500,000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Langkat	100%	12,000,000			100%	12,360,000
3	30	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		2 unit	12,000,000			2 unit	12,360,000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Langkat	100%	815,380,200			100%	826,380,200
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Air Listrik dan Telepon		12 bulan	200,000,000			12 bulan	210,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa yang dibayarkan pegawai non PNS		585 OB	615,380,200			585 OB	616,380,200

3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		100%	199,048,300			100%	212,498,300
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		100%	121,161,300			100%	131,161,300
						Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Kondisi Baik		unit			Unit		
						Kendaraan Dinas Roda empat dengan Kondisi Baik		unit			Unit		
						• Bahan bakar minyak kendaraan dinas		Liter			Liter		
						• Oli kendaraan dinas		12 bulan			12 bulan		
						• Suku cadang kendaraan dinas		12 bulan			12 bulan		
						• Pajak kendaraan dinas		unit			Unit		
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		49 unit	32,887,000			49 unit	33,887,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor		1 unit	45,000,000			1 unit	47,450,000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	DisDagPerind Kab. Langkat	0,15%	55,000,000	APBD		0,16%	57,750,000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		2 pasar	-				-

3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan yang difasilitasi		2 Pasar			2 pasar	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		15%	55,000,000		15%	57,750,000
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Pemeriksaan bahan berbahayadi toko/swalayan		640 Toko/Swalayan			640 Toko/Swalayan	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya yang diawasi		640 Toko/Swalayan	55,000,000		640 Toko/Swalayan	57,750,000
						Sosialisasi SNI wajib , BDKT dan Pelabelan bahan berbahaya	Kab. Langkat	1 sosialisasi			1 Sosialisasi	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara moderen	Kab. Langkat	1 unit	390,000,000	APBD	1 unit	651,700,000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan		1unit	350,000,000		1unit	610,500,000
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang dibangun		1 Unit	350,000,000		1 unit	360,500,000
						Jumlah Pasar Yang direhab					1 unit	100,000,000
						Jumlah Penyediaan sarana distribusi Perdagangan					1 unit	100,000,000

3	30	3	2.02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi						1 unit	50,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang dibina		2 kelompok	40,000,000			2 kelompok	41,200,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola sarana distribusi yang dibina, Pendataan Lokasi Pasar		2 kelompok	40,000,000			2 kelompok	41,200,000
	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	Kab. Langkat/Sumut	5%	258,435,200	APBD		5%	271,356,960
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar Kabupaten		9 komoditi	108,435,200			9 komoditi	113,856,960
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah data Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok		9 komoditi	34,500,000			9 komoditi	36,225,000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		2 kali	73,935,200			2 kali	77,631,960
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja realisasi Pupuk		100%	150,000,000			100%	157,500,000
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengadaan Pupuk dan Pestisida yang diawasi							
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi		134 kios , 2 x	150,000,000			134 kios , 2 x	157,500,000

3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi		801,364,965	APBD		10 produk	902,800,000
								5 produk					
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya nya Promosi dan misi dagang Produk Ekspor Unggulan Daerah		5 Produk	801,364,965			5 Produk	902,800,000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Dikenalnya produk Ekspor unggulan di PRSU		11 produk	715,364,965			11 produk	810,000,000
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi dan pameran dagang		1 pameran				1 pameran	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk daerah yang dipromosikan di HUT Langkat		25 produk	50,000,000			25 produk	55,000,000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		5 Pelaku usaha	36,000,000			6 Pelaku usaha	37,800,000.00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga	Kab Langkat , SUMUT	20%		128,337,900	APBD	25%	128,337,900
						Jumlah pasar tertib ukur	Kab Langkat , SUMUT	2 Pasar			APBD	2 Pasar	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pasar tertib niaga		2 Pasar	128,337,900			2 Pasar	128,337,900
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur		2 Pasar	98,937,900			2 Pasar	98,937,900
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengguna alat UTTP yang diawasi dan Terlaksananya sosialisasi		23 kecamatan, 1 x	29,400,000			23 kecamatan, 1 x	29,400,000

3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk yang dipasarkan didalam negeri	Kab Langkat , SUMUT		140,870,400	APBD			140,870,400
								40%				50%	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi Produk yang dipasarkan didalam Negeri secara online		320 produk	140,870,400			320 Produk	140,870,400
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Promosi Produk yang dipasarkan di dalam Negeri secara online		320 Produk	100,870,400			320 produk	100,870,400
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersosialisasinya Sistem Resi Gudang kepada Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	40,000,000			15 Pelaku Usaha	40,000,000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok IKM	Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi	40%	340,000,000	APBD		40%	1.552,900,000
				Jumlah sentra IKM Aktif			1 Sentra					1 Sentra	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang dibina	Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi	48 kelompok	340,000,000			60 kelompok	1.512,900,000
						Jumlah Pengembangan Sentra IKM		1 Sentra					
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kebijakan Perindustrian		1 peraturan	80,000,000			1 peraturan	40,000,000

3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan kualitas sumber daya industri						
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	2 sentra	260,000,000			2 sentra	736,450,000
						Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan	200 IKM				230 IKM	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan					230 IKM	736,450,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi	Kab Langkat , SUMUT		-	APBD	0,8%	40,000,000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin Usaha Industri yang difasilitasi			-		20 Izin Usaha Industri	40,000,000
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin Usaha Industri yang difasilitasi					20 Izin Usaha Industri	40,000,000

3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Industri	Kab Langkat , SUMUT	22%	40,000,000	APBD	25%	80,000,000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI		17 industri	40,000,000		20 industri	80,000,000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang terdaftar di SIINAS, sosialisasi		17 Industri, 1 kali	40,000,000		20 Industri, 1 kali	40,000,000
3	31	04	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINAS	Tersedianya Data kawasan industri yang Update			-		1 Dokumen	40,000,000
					TOTAL				9,666,035,001			11,480,557,987



B A B IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022(Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	30	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	DisDagPerind Kab. Langkat, dan Sumut dan Luar Provinsi	100%	7,512,026,536	APBD	
				Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100%					
				Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	100%					
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					

						Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	19,000,000			
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		1 Dokumen	5,000,000			
						Jumlah Dokumen Perubahan Renstra		1 Dokumen				
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		1 Dokumen	3,000,000			
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	3,000,000			
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	3,000,000			
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen	5,000,000			
						Jumlah Dokumen LKPJ		1 Dokumen				
						Jumlah Dokumen LPPD		1 Dokumen				
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	DisDagPerind Kabupaten Langkat	100%	5,980,018,355			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	5,820,418,605			

						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		12 Bulan			
						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		12 Bulan			
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, PPTK, KPA, PPK SKPD, Pengelola keuangan		156 OB	154,599,750		
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah		3 Dokumen	5,000,000		
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi	6%	20,000,000		
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Langkat				
3	30	01	2.05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti Diklat	Luar Daerah dan Luar Provinsi				
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang mengikuti Bimtek	Luar Daerah dan Luar Provinsi	3 orang	20,000,000		

3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi	100%	466,579,681		
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor		9 jenis	7,007,246		
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		48 jenis	49,991,809		
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		25 jenis	9,025,898		
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum rapat, tamu dan pengganti uang makan harian pegawai non ASN		600 kotak	12,000,000		
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Fotocopy		12 jenis	135,169,228		
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		12 bulan	3,385,500		
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi	12 bulan	250,000,000		
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Langkat	100%	12,000,000		
3	30	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		2 unit	12,000,000		
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Langkat	100%	815,380,200		

3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Air Listrik dan Telepon		12 bulan	200,000,000		
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa yang dibayarkan pegawai non PNS		585 OB	615,380,200		
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		100%	199,048,300		
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		100%	121,161,300		
						Kendaraan Dinas Roda Dua dengan Kondisi Baik		Unit			
						Kendaraan Dinas Roda empat dengan Kondisi Baik		Unit			
						• Bahan bakar minyak kendaraan dinas		Liter			
						• Oli kendaraan dinas		12 bulan			
						• Suku cadang kendaraan dinas		12 bulan			
						• Pajak kendaraan dinas		Unit			
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		49 unit	32,887,000		
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor		1 unit	45,000,000		

3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	DisDagPerind Kab. Langkat	0,15%	55,000,000	APBD	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		2 pasar	-		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan yang difasilitasi					
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	cakupan Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		15%	55,000,000		
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Pemeriksaan distribusi bahan berbahaya ditoko /swalayan		640 Toko/Swalayan			
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya yang diawasi		640 Toko/Swalayan	55,000,000		
						Sosialisasi SNI wajib , BDKT dan Pelabelan bahan berbahaya	Kab. Langkat	1 sosialisasi			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvensional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Kab. langkat	1 unit	390,000,000	APBD	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan		1 Unit	350,000,000		

3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang dibangun		1 Unit	350,000,000		
3	30	3	2.02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi					
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dibina		2 kelompok	40,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina, Pendataan Lokasi Pasar		2 kelompok/ 23 pasar	40,000,000		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	Kab. Langkat/Sumut	5%	258,435,200	APBD	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar kabupaten		9 komoditi	108,435,200		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah data Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok		9 komoditi	34,500,000		
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		2 kali	73,935,200		
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja realisasi Pupuk		100%	150,000,000		
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengadaan Pupuk dan Pestisida yang diawasi					

3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi		134 kios , 2 x	150,000,000		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi	5 produk	801,364,965	APBD	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya nya Promosi dan misi dagang produk unggulan Daerah		5 Produk	801,364,965		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Dikenalnya Produk Ekspor Unggulan Daerah di PRSU		11 produk	715,364,965		
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi dan pameran dagang		1 pameran			
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk daerah yang dipromosikan di HUT Langkat		25 produk	50,000,000		
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		5 Pelaku usaha	36,000,000		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga	Kab Langkat , SUMUT	20%	128,337,900	APBD	
						Jumlah pasar tertib ukur	Kab Langkat , SUMUT	2 Pasar		APBD	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pasar tertib niaga		2 Pasar	128,337,900		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur		2 Pasar	98,937,900		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengguna alat UTTP yang diawasi dan Terlaksananya sosialisasi		23 kecamatan, 1 x	29,400,000		

3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk yang dipasarkan didalam negeri	Kab Langkat , SUMUT		140,870,400	APBD	
								40%			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi Produk yang dipasarkan dalam Negeri secara online		320 produk	140,870,400		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Produk Dalam Negeri yang dipasarkan secara online		320 produk	100,870,400		
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersosialisasinya Sistem Resi Gudang kepada Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	40,000,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok IKM	Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi	40%	340,000,000	APBD	
						Jumlah sentra IKM Aktif		1 Sentra			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang dibina	Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi	48 kelompok	340,000,000		
						Jumlah Pengembangan sentra IKM		1 Sentra			
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kebijakan Perindustrian		1 peraturan	80,000,000		

3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan kualitas sumber daya industri					
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pengembangan Sentra Industri		2 sentra	260,000,000		
						Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan		200 IKM			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan					
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi	Kab Langkat , SUMUT	100	-	APBD	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin Usaha Industri yang difasilitasi		100	-		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin Usaha Industri yang difasilitasi					
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Industri	Kab Langkat , SUMUT	100 industri	40,000,000	APBD	

3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI		100 industri	40,000,000		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang terdaftar di SIINAS, sosialisasi terkait SIINas		100 Industri,1 kali	40,000,000		
3	31	04	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	Tersedianya Data kawasan industri yang Update			-		
					TOTAL				9,666,035,001		



BAB V
PENUTUP

1. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat tahun 2022 merupakan bagian dan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Keberhasilan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2022, sangat ditentukan oleh kemampuan aparat, baik teknis maupun manajerial serta penempatan personil yang tepat sesuai dengan pengalaman, bakat, minat dan pengabdian serta dukungan masyarakat Kabupaten Langkat.
3. Renja Tahun 2022 dalam rangka pembangunan sektor Perdagangan dan Industri, merupakan hasil perumusan yang berkembang pada saat ini, dan apabila sewaktu-waktu ada akselerasi yang timbul, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

